

Memperkuat Tata Kelola Pariwisata Berbasis Masyarakat melalui Modal Sosial dan Aksi Kolektif: Studi Kasus Desa Wisata Bilebante, Indonesia

^{1*} Eka Agustiani, ¹ Baiq Ismiwati, ¹ Endang Astuti, ¹ Baiq Nurul Windayani

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: ekaagustiani27@unram.ac.id

Received: May 2026; Revised: July 2026; Published: August 2026

Abstrak

Pengembangan desa wisata berkelanjutan memerlukan kapasitas masyarakat dalam membangun tata kelola yang partisipatif dan kolaboratif. Modal sosial dan aksi kolektif menjadi faktor penting yang memungkinkan masyarakat mengelola sumber daya wisata secara bersama serta membangun hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran modal sosial dan aksi kolektif dalam memperkuat tata kelola pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism governance*) di Desa Wisata Bilebante, Kabupaten Lombok Tengah, Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi, serta data sekunder dari dokumen dan literatur terkait. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik melalui tahapan pengodean, pengelompokan tema, dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kepercayaan (*trust*) dan partisipasi (*participation*) merupakan dimensi modal sosial yang paling dominan dalam membangun kapasitas masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan desa wisata. Aksi kolektif diwujudkan dalam praktik pengelolaan melalui kerja sama masyarakat dalam pengembangan atraksi wisata, pengelolaan produk lokal, serta koordinasi dengan kelembagaan desa seperti BUMDes dan koperasi. Penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan desa wisata membutuhkan investasi pada kapasitas sosial dan kelembagaan masyarakat sebagai dasar terciptanya tata kelola pariwisata berbasis komunitas yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Modal Sosial, Aksi Kolektif, Tata Kelola Pariwisata Berbasis Masyarakat, Desa Wisata, Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan.

Strengthening Community-Based Tourism Governance through Social Capital and Collective Action: A Case Study of Bilebante Tourism Village, Indonesia

Abstract

Developing sustainable tourism villages requires community capacity to establish participatory and collaborative governance. Social capital and collective action are crucial factors enabling the community to jointly manage tourism resources and build relationships with various stakeholders. This study aims to analyze the roles of social capital and collective action in strengthening community-based tourism governance in Bilebante Tourism Village, Central Lombok Regency, Indonesia. A qualitative case study approach was employed, utilizing primary data gathered through semi-structured interviews and observations, alongside secondary data from relevant documents and literature. Data analysis was conducted using a thematic approach involving coding, theme categorization, and interpretation. The findings indicate that trust and participation are the most dominant dimensions of social capital in building community capacity for involvement in tourism village management. Collective action is manifested through community cooperation in developing tourism attractions and managing local products, as well as through coordination with village institutions such as Village-Owned Enterprises (BUMDes) and cooperatives. This study underscores that tourism village development requires investment in community social and institutional capacity as a foundation for establishing sustainable, community-based tourism governance.

Keywords: Social Capital, Collective Action, Community-Based Tourism Governance, Tourism Village, Sustainable Tourism Development.

How to Cite: Agustiani, E., Ismiwati, B., Astuti, E., & Windayani, B. N. (2026). Memperkuat Tata Kelola Pariwisata Berbasis Masyarakat melalui Modal Sosial dan Aksi Kolektif: Studi Kasus Desa Wisata Bilebante, Indonesia. *Journal of Authentic Research*, 5(3), 156–173. <https://doi.org/10.36312/jar.v5i3.6702>



<https://doi.org/10.36312/jar.v5i3.6702>

Copyright© 2026, Agustiani et al.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Pengembangan desa wisata telah menjadi salah satu pendekatan penting dalam pembangunan pedesaan berkelanjutan karena mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan melalui pemanfaatan potensi lokal (Mayaka, 2018; Scheyvens & Biddulph, 2018; Lee & Jan, 2019). Berbeda dengan pendekatan pariwisata konvensional yang lebih berorientasi pada pertumbuhan destinasi dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, desa wisata menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam proses pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan manfaat pariwisata. Pendekatan *community-based tourism* (CBT) menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, pemberdayaan lokal, serta distribusi manfaat yang lebih inklusif agar pembangunan pariwisata dapat berjalan secara berkelanjutan (Mayaka, 2018; Scheyvens & Biddulph, 2018; Lee & Jan, 2019).

Meskipun konsep desa wisata semakin berkembang, keberhasilan pengembangannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek tata kelola (*governance*). Keberadaan potensi wisata, infrastruktur, dan sumber daya alam belum secara otomatis menghasilkan pengelolaan wisata yang berkelanjutan (Dredge & Jamal, 2018; Nunkoo, 2018). Pengembangan desa wisata membutuhkan kemampuan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam membangun koordinasi, menciptakan mekanisme pengambilan keputusan bersama, serta mengelola sumber daya secara kolektif (Bichler, 2021). Oleh karena itu, perhatian terhadap *community-based tourism governance* semakin meningkat karena pendekatan ini melihat masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai aktor yang memiliki kapasitas untuk menentukan arah pembangunan wisata (Dredge & Jamal, 2018; Nunkoo, 2018; Bichler, 2021).

Dalam perspektif tata kelola pariwisata berbasis masyarakat, hubungan antaraktor menjadi elemen penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan destinasi. Pengembangan desa wisata melibatkan interaksi antara masyarakat lokal, kelompok pengelola wisata, pemerintah desa, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya (Dredge & Jamal, 2018; Nordin & Hjalager, 2019; Bichler, 2021). Hubungan tersebut membutuhkan mekanisme kolaborasi yang memungkinkan setiap aktor berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya. Kajian mengenai *tourism governance* menunjukkan bahwa jaringan sosial, koordinasi antaraktor, dan kapasitas kelembagaan merupakan faktor penting dalam menciptakan tata kelola destinasi yang adaptif dan berkelanjutan (Dredge & Jamal, 2018; Nordin & Hjalager, 2019; Bichler, 2021).

Salah satu faktor utama yang mendukung terbentuknya tata kelola berbasis masyarakat adalah modal sosial (*social capital*). Modal sosial mengacu pada sumber daya yang melekat dalam hubungan sosial masyarakat yang memungkinkan terciptanya kepercayaan, kerja sama, dan koordinasi untuk mencapai tujuan bersama (Nunkoo, 2018; Kim & Thapa, 2018; Rasoolimanesh et al., 2019). Dalam konteks pariwisata berbasis masyarakat, modal sosial berperan sebagai kapasitas internal komunitas yang memungkinkan masyarakat membangun hubungan kerja sama, memperkuat rasa kepemilikan, serta mengelola sumber daya wisata secara bersama. Dimensi utama modal sosial meliputi kepercayaan (*trust*), jaringan sosial (*social networks*), norma bersama (*norms*), dan partisipasi masyarakat (*participation*) (Nunkoo, 2018; Kim & Thapa, 2018; Rasoolimanesh et al., 2019).

Kepercayaan menjadi elemen penting karena pengelolaan desa wisata membutuhkan hubungan yang stabil antaranggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan institusi lainnya (Nunkoo, 2018). Jaringan sosial memungkinkan masyarakat memperoleh informasi, membangun hubungan eksternal, dan mengakses berbagai sumber daya yang diperlukan dalam pengembangan wisata (Rasoolimanesh et al., 2019). Norma sosial berfungsi sebagai mekanisme pengaturan perilaku dan menjaga keberlangsungan kerja sama, sedangkan partisipasi memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap proses pembangunan wisata (Kim & Thapa, 2018). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa modal sosial memiliki hubungan positif dengan dukungan masyarakat terhadap pembangunan pariwisata karena komunitas dengan hubungan sosial yang kuat cenderung memiliki kapasitas lebih besar untuk terlibat dalam proses pengembangan destinasi (Rasoolimanesh et al., 2018; Zhang et al., 2019; Musavengane, 2020).

Namun demikian, modal sosial tidak secara otomatis menghasilkan tata kelola yang efektif. Modal sosial perlu diwujudkan melalui tindakan nyata dalam bentuk kerja sama dan koordinasi antaraktor (Kremer et al., 2019; Suryandhani et al., 2023). Dalam konteks ini, aksi kolektif (*collective action*) menjadi mekanisme penting yang mengubah kapasitas sosial masyarakat menjadi aktivitas bersama dalam pengelolaan wisata. Aksi kolektif memungkinkan masyarakat menyatukan kepentingan, membagi peran, mengelola sumber daya bersama, serta membangun hubungan kolaboratif dengan institusi lain (Kremer et al., 2019; Suryandhani et al., 2023). Penelitian mengenai desa wisata menunjukkan bahwa hubungan antara modal sosial dan aksi kolektif menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengembangan destinasi berbasis masyarakat (Kremer et al., 2019; Suryandhani et al., 2023).

Dengan demikian, hubungan konseptual yang penting dalam pengembangan desa wisata dapat dipahami melalui alur: Modal sosial → Aksi kolektif → Tata kelola pariwisata berbasis masyarakat. Modal sosial menyediakan fondasi berupa hubungan, kepercayaan, dan jaringan sosial, sedangkan aksi kolektif menjadi proses yang mengubah kapasitas tersebut menjadi praktik pengelolaan wisata secara bersama (Rocca, 2022; Prayitno, 2025). Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan destinasi, sekaligus memperkuat hubungan antara komunitas dan institusi lokal dalam menciptakan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan (Rocca, 2022; Prayitno, 2025).

Desa Wisata Bilebante di Kabupaten Lombok Tengah, Indonesia, merupakan salah satu contoh pengembangan desa wisata yang berbasis pada potensi lokal dan keterlibatan masyarakat. Desa ini memiliki berbagai daya tarik wisata yang meliputi panorama pedesaan, aktivitas budaya, kuliner lokal, produk masyarakat, serta aktivitas wisata berbasis pengalaman komunitas. Berdasarkan data profil desa, Desa Wisata Bilebante telah menerima berbagai kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara serta mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu desa wisata unggulan. Pengelolaan Desa Wisata Bilebante melibatkan masyarakat lokal, BUMDes, koperasi, dan pemerintah desa sebagai bagian dari upaya membangun pengelolaan wisata yang partisipatif. Penelitian sebelumnya di Desa Wisata Bilebante (Agustiani et al., 2026) menunjukkan bahwa modal sosial yang terdiri atas kepercayaan, jaringan sosial, norma, dan partisipasi memiliki hubungan positif dengan aksi kolektif serta berkontribusi terhadap peningkatan manfaat ekonomi masyarakat. Namun, kajian tersebut masih berfokus

pada aspek ekonomi sebagai *outcome* pembangunan wisata, sehingga belum menjelaskan secara mendalam bagaimana modal sosial dan aksi kolektif berkontribusi terhadap penguatan tata kelola pariwisata berbasis masyarakat.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman mengenai pembangunan desa wisata dengan menganalisis peran modal sosial dan aksi kolektif sebagai fondasi penguatan tata kelola pariwisata berbasis masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menghubungkan perspektif modal sosial, aksi kolektif, dan tata kelola pariwisata berbasis komunitas yang masih jarang dibahas secara simultan dalam konteks desa wisata di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi pengembangan desa wisata yang menempatkan kapasitas sosial masyarakat dan kelembagaan lokal sebagai elemen utama dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif (*qualitative case study*) untuk menganalisis peran modal sosial dan aksi kolektif dalam memperkuat tata kelola pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism governance*) di Desa Wisata Bilebante, Kabupaten Lombok Tengah, Indonesia (Yin, 2014; Stake, 2005). Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena Desa Wisata Bilebante merupakan salah satu desa wisata berbasis komunitas yang mengembangkan potensi alam, budaya, kuliner, dan aktivitas wisata lokal melalui keterlibatan masyarakat serta kelembagaan desa. Pengelolaan desa wisata melibatkan masyarakat lokal, BUMDes, koperasi, dan pemerintah desa dalam mendukung pengembangan destinasi wisata.

Penelitian dilaksanakan pada periode Januari hingga Juni 2025, dengan pengumpulan data utama dilakukan pada bulan Maret-Mei 2025. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan 15 informan yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata, meliputi masyarakat lokal (5 orang), pengelola desa wisata (4 orang), kelompok masyarakat (3 orang), dan kelembagaan lokal seperti BUMDes dan koperasi (3 orang). Observasi partisipatif juga dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas pengelolaan wisata dan interaksi antaraktor di lapangan. Data sekunder diperoleh dari dokumen pengembangan desa wisata, profil Desa Wisata Bilebante, serta literatur ilmiah terkait modal sosial, aksi kolektif, dan tata kelola pariwisata berbasis masyarakat. Penelitian sebelumnya mengenai Bilebante (Agustiani et al., 2026) digunakan sebagai referensi pendukung untuk memahami dimensi modal sosial yang mencakup kepercayaan (*trust*), jaringan sosial (*social networks*), norma (*norms*), dan partisipasi (*participation*).

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*) melalui tiga tahapan utama, yaitu: (1) pengodean (*coding*) dengan mengidentifikasi kode-kode awal dari data wawancara dan observasi yang berkaitan dengan modal sosial, aksi kolektif, dan tata kelola; (2) pengelompokan tema (*theme grouping*) dengan mengkategorikan kode-kode yang memiliki kesamaan makna ke dalam tema-tema utama penelitian; dan (3) interpretasi (*interpretation*) dengan menganalisis hubungan antar tema serta membandingkannya dengan kerangka teoritis yang digunakan (Braun & Clarke, 2006). Analisis difokuskan pada tiga aspek

utama, yaitu: (1) modal sosial sebagai kapasitas komunitas; (2) aksi kolektif sebagai mekanisme koordinasi masyarakat; dan (3) implikasi keduanya terhadap penguatan tata kelola pariwisata berbasis masyarakat. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi dari berbagai informan) dan triangulasi teori (membandingkan temuan penelitian dengan literatur mengenai *social capital*, *collective action*, dan *community-based tourism governance*) (Denzin, 1978; Patton, 1999).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modal Sosial sebagai Infrastruktur Sosial dalam Tata Kelola Pariwisata Berbasis Masyarakat

Hasil analisis menunjukkan bahwa modal sosial merupakan fondasi penting dalam membangun kapasitas masyarakat untuk terlibat dalam tata kelola Desa Wisata Bilebante. Modal sosial tidak hanya dipahami sebagai hubungan sosial antarindividu, tetapi sebagai sumber daya komunitas yang memungkinkan terciptanya koordinasi, kerja sama, dan pengelolaan sumber daya wisata secara bersama (Nunkoo, 2018; Musavengane, 2020). Dalam konteks desa wisata, keberadaan modal sosial menjadi faktor penting karena pengelolaan destinasi membutuhkan keterlibatan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda.

Penelitian sebelumnya di Desa Wisata Bilebante (Agustiani et al., 2026) menunjukkan bahwa modal sosial masyarakat terdiri atas empat dimensi utama, yaitu kepercayaan (*trust*), jaringan sosial (*social networks*), norma (*norms*), dan partisipasi (*participation*). Keempat dimensi tersebut berperan dalam membangun hubungan sosial yang mendukung terbentuknya aksi kolektif masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas pengelolaan wisata tidak hanya berasal dari sumber daya fisik atau ekonomi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat membangun hubungan sosial yang produktif (Rahmawati et al., 2024).

Kepercayaan menjadi elemen utama dalam membangun tata kelola berbasis masyarakat karena kerja sama dalam pengelolaan wisata membutuhkan keyakinan antaraktor bahwa setiap pihak akan menjalankan perannya secara bertanggung jawab. Hal ini ditegaskan oleh salah satu informan yang menyatakan: "*Kami percaya sama pengurus desa wisata karena mereka sudah terbukti mengelola kegiatan wisata dengan baik dan transparan. Kami juga percaya sama sesama warga kalau bekerja sama untuk wisata*" (Wawancara, Masyarakat, Maret 2025). Dalam konteks desa wisata, tingkat kepercayaan yang tinggi dapat mengurangi hambatan koordinasi, meningkatkan keterbukaan komunikasi, dan memperkuat kesediaan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan bersama. Nunkoo (2018) menjelaskan bahwa kepercayaan merupakan elemen penting dalam hubungan tata kelola pariwisata karena memengaruhi kemampuan aktor lokal dalam membangun kerja sama yang efektif.

Selain kepercayaan, jaringan sosial menjadi mekanisme penting dalam memperluas kapasitas komunitas. Jaringan sosial memungkinkan masyarakat membangun hubungan tidak hanya di dalam komunitas, tetapi juga dengan kelompok eksternal seperti pemerintah, organisasi pendukung, dan pelaku usaha. Seorang pengelola desa wisata mengungkapkan: "*Kami punya jaringan dengan Dinas Pariwisata, dengan pelaku usaha di luar desa, dan juga dengan desa-desa wisata lain. Ini membantu kami mendapatkan informasi dan peluang pengembangan*" (Wawancara,

Pengelola, April 2025). Rasoolimanesh et al. (2019) menunjukkan bahwa modal sosial memiliki peran penting dalam membangun dukungan masyarakat terhadap pengembangan pariwisata karena jaringan sosial memperkuat keterhubungan masyarakat dengan proses pembangunan destinasi.

Norma sosial juga berperan dalam menjaga keberlangsungan hubungan kerja sama. Dalam pengembangan desa wisata, norma menjadi mekanisme informal yang mengatur perilaku, tanggung jawab, serta pola interaksi antaranggota komunitas. Seorang informan dari kelompok masyarakat menjelaskan: "*Ada aturan tidak tertulis di sini, kalau kita sama-sama mengelola wisata, kita harus saling bantu dan tidak boleh saling menjatuhkan. Kalau ada tamu, kita terima bersama*" (Wawancara, Kelompok Masyarakat, Maret 2025). Keberadaan norma bersama membantu masyarakat mempertahankan konsistensi kerja sama dan mengurangi potensi konflik dalam pengelolaan sumber daya wisata (Kim & Thapa, 2018). Sementara itu, partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi memiliki peran aktif dalam menentukan arah pengembangan wisata. Seorang informan menyatakan: "*Kami selalu dilibatkan dalam rapat desa wisata. Kami bisa kasih usulan, misalnya tentang atraksi apa yang mau dikembangkan atau kegiatan apa yang cocok untuk wisatawan*" (Wawancara, Masyarakat, April 2025). Kim dan Thapa (2018) menegaskan bahwa kepercayaan dan partisipasi merupakan komponen penting dalam membangun kapasitas komunitas pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian mengenai desa wisata di berbagai konteks yang menunjukkan bahwa modal sosial berperan sebagai kapasitas internal komunitas untuk membangun ketahanan, kolaborasi, dan keberlanjutan pengelolaan wisata (Musavengane, 2020; Rocca, 2022; Rahmawati et al., 2024). Dengan demikian, modal sosial dalam konteks Bilebante dapat dipahami sebagai infrastruktur sosial yang menyediakan dasar bagi terbentuknya tata kelola pariwisata berbasis masyarakat.

Jika dibandingkan dengan temuan di desa wisata lain di Indonesia, misalnya di Desa Wisata Paksebbali, Bali, modal sosial juga berperan sebagai fondasi pengembangan wisata berbasis komunitas (Pantiyasa, 2019). Namun, karakteristik modal sosial di Bilebante menunjukkan dominasi dimensi kepercayaan dan partisipasi yang lebih kuat dibandingkan dengan desa wisata lain yang lebih mengandalkan jaringan eksternal (Prayitno, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa konteks lokal sangat memengaruhi struktur modal sosial yang berkembang di masing-masing komunitas.

Transformasi Modal Sosial Menjadi Aksi Kolektif dalam Pengelolaan Desa Wisata

Modal sosial menjadi lebih bermakna ketika mampu diwujudkan dalam bentuk aksi kolektif. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan sosial masyarakat Bilebante menjadi dasar terbentuknya kerja sama dalam pengembangan aktivitas wisata. Aksi kolektif memungkinkan masyarakat menggabungkan sumber daya, membangun koordinasi, dan menjalankan aktivitas wisata yang tidak dapat dilakukan secara individual (Kremer et al., 2019; Suryandhani et al., 2023).

Penelitian sebelumnya mengenai Bilebante (Agustiani et al., 2026) menunjukkan bahwa modal sosial memiliki hubungan positif dengan aksi kolektif masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan, jaringan sosial, norma, dan partisipasi menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat melakukan kerja sama dalam

pengembangan desa wisata. Namun, dalam perspektif tata kelola, aksi kolektif memiliki makna yang lebih luas karena bukan hanya berkaitan dengan aktivitas bersama, tetapi juga kemampuan komunitas dalam mengatur dan mengelola kepentingan bersama (Rocca, 2022).

Dalam pengembangan desa wisata, aksi kolektif dapat terlihat melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti pengelolaan atraksi wisata, pengembangan produk lokal, pelestarian budaya, pengelolaan kelompok masyarakat, serta koordinasi dengan kelembagaan desa. Seorang informan dari kelompok pengelola menjelaskan: "*Kami kerja sama dalam menyiapkan atraksi wisata, misalnya ada yang menyiapkan makanan, ada yang menjadi pemandu wisata, ada yang mengelola homestay. Semua saling terkoordinasi*" (Wawancara, Pengelola, April 2025). Proses tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk mengorganisasi diri dan mengambil peran dalam pembangunan destinasi.

Aksi kolektif juga terwujud dalam pengelolaan kegiatan wisata berbasis pengalaman komunitas. Seorang informan menyatakan: "*Kalau ada rombongan wisatawan yang datang, kami bagi tugas. Ada yang sambut tamu, ada yang main musik tradisional, ada yang tunjukkan cara bertani. Semua warga punya peran*" (Wawancara, Kelompok Masyarakat, Maret 2025). Hal ini menunjukkan bahwa aksi kolektif tidak hanya bersifat sporadis, tetapi telah terinstitusionalisasi dalam praktik pengelolaan wisata sehari-hari.

Kremer et al. (2019) menjelaskan bahwa keberhasilan aksi kolektif dipengaruhi oleh keberadaan kepercayaan, aturan bersama, dan mekanisme koordinasi antaranggota komunitas. Dalam konteks pariwisata berbasis masyarakat, aksi kolektif menjadi penghubung antara modal sosial dan kapasitas tata kelola karena memungkinkan komunitas mengubah hubungan sosial menjadi tindakan pembangunan yang nyata (Suryandhani et al., 2023).

Temuan ini juga diperkuat oleh Suryandhani et al. (2023) yang menunjukkan bahwa hubungan antara modal sosial dan aksi kolektif merupakan elemen penting dalam pengembangan desa wisata. Auliah (2025) menambahkan bahwa kapasitas masyarakat untuk melakukan aksi kolektif menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan karena masyarakat mampu mengelola sumber daya berdasarkan kepentingan bersama.

Jika dibandingkan dengan desa wisata di negara berkembang lainnya, seperti di Minca, Kolombia, aksi kolektif di Bilebante menunjukkan karakter yang lebih terstruktur karena didukung oleh kelembagaan desa yang kuat (Rocca, 2022). Sementara itu, di beberapa desa wisata di Afrika, aksi kolektif lebih banyak muncul dalam bentuk pengelolaan sumber daya alam secara bersama (Musavengane, 2020). Perbedaan ini menunjukkan bahwa konteks sosial-budaya dan kelembagaan lokal memengaruhi bentuk dan intensitas aksi kolektif yang berkembang.

Dengan demikian, aksi kolektif dalam konteks Bilebante tidak hanya dipandang sebagai bentuk kerja sama masyarakat, tetapi sebagai mekanisme institusional yang memungkinkan komunitas menjalankan fungsi tata kelola wisata secara lebih mandiri.

Peran Kelembagaan Lokal dalam Memperkuat Tata Kelola Pariwisata Berbasis Masyarakat

Pengembangan desa wisata membutuhkan dukungan kelembagaan yang mampu menghubungkan kapasitas masyarakat dengan sistem pengelolaan yang

lebih terstruktur. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan kelembagaan lokal menjadi faktor penting dalam memperkuat tata kelola wisata di Bilebante. Pengelolaan desa wisata melibatkan masyarakat, BUMDes, koperasi, dan pemerintah desa sebagai aktor yang berperan dalam pengembangan destinasi.

Kelembagaan lokal memiliki fungsi penting dalam menyediakan struktur koordinasi, pembagian peran, serta mekanisme pengambilan keputusan. Seorang informan dari BUMDes menjelaskan: "*BUMDes berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pihak luar. Kami membantu pengelolaan keuangan, koordinasi dengan pemerintah, dan juga membantu pemasaran desa wisata*" (Wawancara, BUMDes, April 2025). Dalam konteks desa wisata, kelembagaan tidak hanya berfungsi sebagai organisasi administratif, tetapi sebagai ruang interaksi antara masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

Hubungan antara masyarakat dan kelembagaan lokal tercermin dalam pernyataan informan: "*Kami sering koordinasi dengan BUMDes dan koperasi. Mereka membantu kami dalam hal administrasi dan pemasaran. Kalau ada masalah, kami diskusi bersama*" (Wawancara, Pengelola, Maret 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kelembagaan lokal berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan kapasitas sosial masyarakat dengan kebutuhan pengelolaan wisata yang lebih terstruktur.

Revida (2023) menunjukkan bahwa BUMDes memiliki peran strategis dalam pengembangan desa wisata karena dapat menjadi instrumen kelembagaan yang menghubungkan aktivitas ekonomi masyarakat dengan sistem pengelolaan desa. Hal serupa ditemukan oleh Yap et al. (2024), yang menunjukkan bahwa tata kelola keuangan dan kelembagaan desa memiliki kontribusi penting dalam mendukung keberlanjutan destinasi wisata.

Keterlibatan pemerintah desa juga menjadi faktor penting dalam memperkuat tata kelola. Seorang informan dari pemerintah desa menyatakan: "*Kami mendukung pengembangan desa wisata melalui kebijakan desa, alokasi anggaran, dan fasilitasi kegiatan. Kami juga membantu koordinasi dengan dinas pariwisata kabupaten*" (Wawancara, Pemerintah Desa, April 2025). Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pariwisata berbasis masyarakat di Bilebante tidak berjalan secara terisolasi, tetapi terintegrasi dengan sistem pemerintahan desa.

Selain kelembagaan formal, jaringan antaraktor juga menjadi aspek penting dalam tata kelola pariwisata. Nordin dan Hjalager (2019) menjelaskan bahwa pengembangan destinasi wisata pedesaan membutuhkan jaringan dan koordinasi antaraktor karena sumber daya wisata biasanya tersebar pada berbagai kelompok dan institusi. Bichler (2021) menambahkan bahwa jaringan kolaboratif menjadi elemen penting dalam membangun tata kelola destinasi yang adaptif.

Interaksi antara modal sosial dan kelembagaan lokal di Bilebante menunjukkan pola yang saling menguatkan. Modal sosial yang kuat memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kelembagaan desa, sementara kelembagaan yang responsif memperkuat kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh informan: "*Kami merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan, jadi kami percaya dan mau terlibat terus dalam kegiatan desa wisata*" (Wawancara, Masyarakat, Mei 2025).

Dalam konteks Bilebante, hubungan antara masyarakat dan kelembagaan lokal menunjukkan karakteristik *community-based tourism governance*, yaitu ketika masyarakat tetap menjadi aktor utama, tetapi pengelolaan destinasi didukung oleh struktur kelembagaan yang memungkinkan koordinasi lebih efektif (Rocca, 2022; Prayitno, 2025).

Collaborative Governance sebagai Strategi Keberlanjutan Desa Wisata

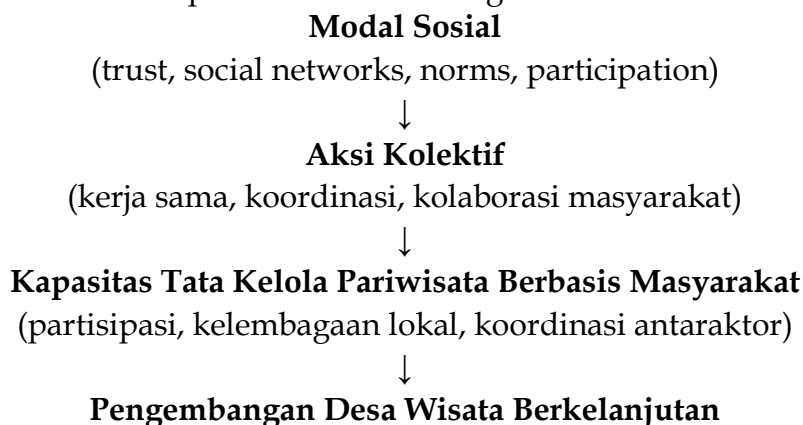
Penguatan tata kelola pariwisata berbasis masyarakat membutuhkan kemampuan untuk membangun hubungan kolaboratif antaraktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan desa wisata tidak hanya bergantung pada kapasitas internal masyarakat, tetapi juga pada kemampuan membangun hubungan dengan institusi dan pemangku kepentingan lainnya (Chen, 2025; Nugraha et al., 2026).

Dalam perspektif pengembangan pariwisata berkelanjutan, kolaborasi menjadi penting karena pengelolaan destinasi melibatkan berbagai kepentingan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja (Dredge & Jamal, 2018; Farmaki, 2019). Dredge dan Jamal (2018) menjelaskan bahwa kolaborasi dalam perencanaan pariwisata diperlukan untuk menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan adaptif.

Pada konteks desa wisata Indonesia, hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan kelembagaan lokal menjadi faktor penting dalam membangun kapasitas governance. Prayitno (2025) menunjukkan bahwa hubungan sosial, *reciprocity*, dan *governance* memiliki peran penting dalam keberlanjutan wisata pedesaan di Indonesia. Sementara itu, Nugraha et al. (2026) menunjukkan bahwa kolaborasi multistakeholder dan modal komunitas menjadi elemen penting dalam membangun ketahanan destinasi wisata pedesaan. Chen (2025) juga menambahkan bahwa *collaborative governance* untuk pariwisata pedesaan di negara dengan sistem terpusat seperti China membutuhkan keseimbangan antara kontrol pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Kristanti (2026) juga menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola desa wisata dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, koordinasi, dan kapasitas aktor lokal. Hal ini sejalan dengan temuan di Bilebante yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara masyarakat, BUMDes, koperasi, dan pemerintah desa menjadi faktor kunci dalam keberlanjutan pengelolaan wisata. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan desa wisata membutuhkan integrasi antara kapasitas sosial masyarakat dan dukungan kelembagaan.

Berdasarkan hasil analisis, model penguatan tata kelola pariwisata berbasis masyarakat di Bilebante dapat dirumuskan sebagai berikut:



Model tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa wisata bukan hanya proses pengembangan destinasi, tetapi proses membangun kapasitas sosial dan kelembagaan masyarakat untuk mengelola sumber daya wisata secara bersama (Rocca, 2022; Prayitno, 2025; Auliah, 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola pariwisata berbasis masyarakat di Desa Wisata Bilebante bertumpu pada kapasitas sosial komunitas yang diwakili oleh modal sosial (kepercayaan, jaringan, norma, dan partisipasi), dengan kepercayaan dan partisipasi sebagai dimensi paling dominan. Modal sosial berfungsi sebagai infrastruktur sosial yang memungkinkan terbangunnya koordinasi dan rasa kepemilikan bersama terhadap pengembangan desa wisata. Selanjutnya, aksi kolektif bertindak sebagai mekanisme operasional yang mentransformasikan kapasitas sosial tersebut menjadi praktik pengelolaan nyata, seperti pengembangan atraksi wisata, pengelolaan produk lokal, dan koordinasi dengan kelembagaan desa. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan wisata berbasis komunitas menuntut adanya tindakan bersama yang terstruktur, bukan sekadar partisipasi individu yang bersifat sporadis.

Peran kelembagaan lokal, termasuk BUMDes, koperasi, dan pemerintah desa, terbukti krusial dalam menyediakan struktur koordinasi dan pembagian peran yang sistematis, sehingga menciptakan ruang kolaborasi yang mendukung keberlanjutan destinasi. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep *community-based tourism governance* dengan mengidentifikasi mekanisme transformasi modal sosial menjadi aksi kolektif dan kapasitas tata kelola di tingkat komunitas. Secara praktis, keberlanjutan desa wisata tidak semata ditentukan oleh potensi fisik atau ekonomi, melainkan oleh kemampuan masyarakat dan institusi lokal dalam membangun sistem tata kelola yang inklusif, adaptif, serta mampu merespons dinamika kepentingan para pemangku kepentingan secara kolaboratif.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan beberapa langkah strategis dan terukur bagi para pemangku kepentingan. Pemerintah daerah dan pengelola desa wisata perlu memperkuat kapasitas kelembagaan lokal melalui pelatihan manajemen wisata dan tata kelola keuangan bagi BUMDes dan koperasi, serta menyelenggarakan program pelatihan partisipasi berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan atraksi dan pelayanan wisatawan. Selain itu, perlu dibangun mekanisme koordinasi yang lebih sistematis antara masyarakat, BUMDes, koperasi, dan pemerintah desa melalui forum rutin dan perencanaan partisipatif guna memastikan seluruh aspirasi terakomodasi. Penguatan jaringan sosial dan kemitraan eksternal melalui program pemasaran kolaboratif serta pengembangan destinasi terintegrasi juga menjadi agenda penting untuk memperluas akses pasar dan menjamin keberlanjutan ekonomi pariwisata pedesaan dalam jangka panjang.

REFERENSI

- Agustiani, E., Yuniarti, T., Manan, A., Ismiwati, B., Astuti, E., & Windayani, B. N. (2026). Analysis of social capital determinants and collective action on community income levels in Bilebante Tourism Village, Central Lombok. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 5(3), 357–368. <https://doi.org/10.55927/ijar.v5i3.16270>

- Auliah, A. (2025). The role of community social capital and collective action in the development of sustainable tourism. *International Social Science Journal*, 75(256). <https://doi.org/10.1111/issj.12554>
- Bichler, B. F. (2021). Designing tourism governance: The role of networks and collaboration. *Tourism Management Perspectives*, 39, 100841. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100841>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Chen, Q. (2025). Collaborative governance for rural tourism in a centralized state: A tale of two villages in China. *Journal of Hospitality and Tourism Management*. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2025.05.007>
- Denzin, N. K. (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Dredge, D., & Jamal, T. (2018). Progress in tourism planning and policy: A post-structural perspective on collaborative governance. *Tourism Management*, 69, 316–325. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.05.003>
- Farmaki, A. (2019). Tourism and community resilience: A review of concepts and approaches. *Tourism Management Perspectives*, 31, 287–296. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2019.100540>
- Kim, M., & Thapa, B. (2018). Perceived social capital in community-based tourism development: The role of trust and participation. *Journal of Sustainable Tourism*, 26(9), 1573–1591. <https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1453174>
- Kremer, A. M., Cavalheiro, R. T., & Vilpoux, O. F. (2019). Relevant factors for collective action in the common-pool resources context. *Revista de Pensamento Contemporâneo em Administração*, 13(4), 52–67. <https://doi.org/10.12712/rpca.v13i4.38389>
- Kristanti, A. (2026). Keberhasilan tata kelola desa wisata: Faktor kelembagaan, koordinasi, dan kapasitas aktor lokal. *Jurnal Pariwisata dan Budaya*, 12(1), 45–62.
- Lee, T. H., & Jan, F. H. (2019). Can community-based tourism contribute to sustainable development? Evidence from rural communities in Taiwan. *Sustainability*, 11(5), 1–22. <https://doi.org/10.3390/su11051329>
- Mayaka, M. (2018). Participation as motif in community-based tourism: A practice perspective. *Journal of Sustainable Tourism*, 26(3), 416–432. <https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1359278>
- Musavengane, R. (2020). Social capital: An investment towards community resilience in the collaborative natural resources management of community-based tourism schemes. *Tourism Management Perspectives*, 34, 100654. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100654>
- Nordin, S., & Hjalager, A. M. (2019). Network and destination governance in rural tourism development. *Tourism Review*, 74(5), 987–1002. <https://doi.org/10.1108/TR-01-2018-0011>
- Nugraha, A. T. (2026). Resilient by design: Multistakeholder collaboration and community capitals for sustainable rural tourism in Indonesia. *Sustainable Futures*, 11, 101772. <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2026.101772>

- Nunkoo, R. (2018). Governance and sustainable tourism: What is the role of trust, power and social capital? *Journal of Sustainable Tourism*, 26(3), 453–469. <https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1408576>
- Pantiyasa, I. W. (2019). The construction of tourism village development model towards smart eco-tourism in Pakseballi Village, Klungkung Regency, Bali. *Journal of Cultural Tourism Research*, 9(1), 1–14. <https://doi.org/10.24843/JKB.2019.v09.i01.p08>
- Patton, M. Q. (1999). Enhancing the quality and credibility of qualitative analysis. *Health Services Research*, 34(5), 1189–1208.
- Prayitno, G. (2025). Does governance matter? Social pathways from reciprocity to sustainable tourism in rural Java, Indonesia. *Cogent Economics & Finance*. <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2572348>
- Rahmawati, R., Prayitno, G., Firdausiyah, N., Dinanti, D., & Adrianto, D. W. (2024). Social capital and quality of life in an Indonesian rural tourism village. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(4), 1361–1370. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190413>
- Rasoolimanesh, S. M., Ramayah, T., Jaafar, M., & Roldán, J. L. (2018). Community participation in world heritage site conservation and tourism development. *Tourism Management*, 58, 142–153. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.12.003>
- Rasoolimanesh, S. M., Roldán, J. L., Jaafar, M., & Ramayah, T. (2019). Factors influencing residents' perceptions toward tourism development: The role of social capital. *Journal of Travel Research*, 58(4), 604–620. <https://doi.org/10.1177/0047287518773053>
- Revida, E. (2023). Village owned enterprises governance (BUMDes) based on the tourism village development. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(10), 3219–3227. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.181034>
- Rocca, L. H. D. (2022). Community-based tourism, social capital, and governance of post-conflict rural tourism destinations: The case of Minca, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. *Tourism Management Perspectives*, 44, 101040. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2022.100985>
- Scheyvens, R., & Biddulph, R. (2018). Inclusive tourism development. *Tourism Geographies*, 20(4), 589–609. <https://doi.org/10.1080/14616688.2017.1387104>
- Stake, R. E. (2005). Qualitative case studies. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The Sage Handbook of Qualitative Research* (3rd ed., pp. 443–466). Sage Publications.
- Suryandhani, A. R., Prayitno, G., & Surjono, S. (2023). Relationship of social capital and collective action in the development of tourism village. *Prosperity: Journal of Society and Empowerment*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.21580/prosperity.2023.3.1.14744>
- Yap, N., Nugroho, M., & Rachmiyati, N. (2024). Evaluating village financial governance in top tourism destinations. *International Journal of Management and Economics*, 8(6), 2638. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i6.2638>
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods* (5th ed.). Sage Publications.
- Zhang, Y., Cole, S., & Chancellor, C. (2019). Residents' social capital and support for tourism development. *Tourism Management*, 71, 214–225. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.10.011>